

Kejagung Periksa 6 Saksi Kasus Korupsi BAKTI Kominfo

JAKARTA (IM) - BAKTI Kemenkominfo mempunyai peran sengaja mengeluarkan peraturan yang diatur sedemikian rupa sehingga tidak terwujudnya persaingan usaha yang sehat serta kompetitif dalam mendapatkan harga penawaran.

Untuk tersangka GMS yaitu selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia mempunyai peran memberikan masukan kepada AAL ke dalam Peraturan Direktur Utama.

Hal itu dimaksudkan menguntungkan vendor dan konsorsium serta perusahaan yang bersangkutan.

Sementara tersangka YS selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020 mempunyai peran membuat kajian teknis.

Dalam membuat kajian teknis itu YS diduga memanfaatkan Lembaga Hudev UI.

Untuk tersangka, Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment, MA. Dia diduga melawan hukum melakukan permafakatan jahat dengan tersangka AAL.

Sedangkan, peranan IH dalam perkara ini yaitu bahwa yang bersangkutan sebagai Komisaris PT Solitech Media Sinerj telah secara melawan hukum bersama-sama melakukan permafakatan jahat dengan Tersangka AAL untuk mengkondisikan pelaksanaan pengadaan BTS 4G pada BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika sedemikian rupa, sehingga mengarahkan ke penyedia tertentu yang menjadi pemenang dalam paket 1, 2, 3, 4 dan 5.

Sebelumnya diketahui, Kejaksaan Agung telah menetapkan lima orang tersangka dalam perkara tersebut. Mereka adalah, AAL, GMS, YS, MA, dan IH.

Tersangka AAL yaitu selaku Direktur Utama

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



UJI PUBLIK RANCANGAN PKPU PENCALONAN ANGGOTA DPR DAN DPRD

Dirjen PP Kemenkumham Asep Nana Mulyana (kiri) berbincang dengan Deputy Bidang Teknis KPU Muhammad Eberta Kawima (kedua kiri) saat uji publik rancangan Peraturan KPU (PKPU) di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (8/3). KPU menggelar uji publik rancangan PKPU tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024.

Kemenkumham Optimalkan Layanan Publik Lindungi Kekayaan Intelektual

Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif pada 12 Juli 2022, sertifikat kekayaan intelektual dapat dijamin ke bank sebagai fidusia.

PALEMBANG (IM) - Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM, Bane Raja Manalu, mengatakan, Kemenkumham terus melakukan terobosan

untuk peningkatan pelayanan publik, termasuk dalam perlindungan kekayaan intelektual.

Hal itu disampaikan Bane

dalam Kegiatan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Mendengar, di Aula Universitas Kader Bangsa Palembang, Selasa (7/3).

“Digitalisasi birokrasi dilakukan dengan tujuan agar pelayanan kepada masyarakat lebih efektif dan efisien. Birokrasi semakin mudah, cepat, dan murah” ujar Bane

Terobosan dalam layanan publik berbasis digital yang

dilakukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham juga berupa penghargaan Top Digital Implementation 2022.

“Tahun 2022 permohonan kekayaan intelektual mencapai 257.335. Kontribusi KI pada 2019 mencapai Rp1.105 triliun dan menyerap 27 juta tenaga kerja,” imbuhnya.

Bane juga mengajak agar masyarakat bisa mengoptimalkan peluang dari kekayaan intelektual dengan melakukan kolaborasi pemerintah daerah, lakukan *one village one brand* untuk mengembangkan merek (*branding*) produk lokal.

“Ayo optimalkan peluang dari kekayaan intelektual dengan melakukan kolaborasi pemerintah daerah, lakukan program *one village one brand*, untuk mengembangkan *branding* produk lokal,” ujar Bane yang merupakan alumni Universitas Indonesia tersebut.

Sementara, Kakanwil Kemenkumham Sumsel Iham Djaya pada acara tersebut mengatakan sangat berbagia atas kehadiran para undangan.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan dan menguatkan pelayanan publik KI kepada UMKM, pelaku usaha, mahasiswa, pelajar, budayawan, tokoh masyarakat, akademisi, penggiat KI, penggiat seni di wilayah Sumsel khususnya Kota Palembang.

Kegiatan ini juga diharapkan dapat membantu untuk menjalin kerja sama dan membangun hubungan yang lebih baik dengan pelaku usaha, organisasi, dan masyarakat. “Suatu kekayaan intelektual itu perlu dilindungi agar tidak disalahgunakan, dibajak, atau ditiru oleh pihak lain,” ujar Iham.

Rektor Universitas Kader Bangsa (UKB) Palembang, Irzanita, menyampaikan selaras dengan visi lembaganya menjadi universitas kaderisasi

yang unggul di Sumsel.

Sinergi UKB bersama Kanwil Kemenkumham Sumsel dinilai akan menambah ruang dan jangkauan dalam implementasi tri dharma, baik dari sisi pendidikan, penelitian hingga pengabdian kepada masyarakat.

“Universitas Kader Bangsa memiliki berbagai hasil penelitian berupa karya cipta yang perlu disinergikan dengan DJKI Kemenkumham sehingga kami sangat mengapresiasi pihak Kanwil Kemenkumham Sumsel yang telah menggelar kegiatan ini,” kata Rektor UKB.

Pemfaatan digitalisasi dalam pelayanan publik, di antaranya dilakukan DJKI Kemenkumham melalui Persewaan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC) dan POP Merek. Layanan pencatatan hak cipta dan merek yang semula memerlukan waktu 23 hari, kini selesai paling lama dalam 10 menit.

Perlindungan kekayaan intelektual sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan/pemalsuan pihak lain, menumbuhkan citra positif, menjamin kepastian hukum, dan tentunya bermanfaat secara ekonomi.

Selain berpeluang mendapat hak royalti, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif pada 12 Juli 2022, sertifikat kekayaan intelektual dapat dijamin ke bank sebagai fidusia.

Dengan demikian, kemudahan dalam layanan perlindungan kekayaan intelektual diharapkan mendorong masyarakat untuk semakin memahami pentingnya perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. Khususnya dalam usaha meningkatkan perekonomian dan daya kreatif generasi muda menuju Indonesia Emas tahun 2045.

● han

Polda Sumut Sita 46 Kg Sabu dan 19.760 Pil Ekstasi

MEDAN (IM) - Tim dari Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut gagal peredaran 46 kilogram narkoba jenis sabu, dan belasan ribu butir pil ekstasi, dengan menangkap seorang tersangka berinisial RM alias Memet, di Jalan Mahoni Batu 5 Lingkungan X Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai.

Kapolda Sumut, Irjen Panca Putra Simanjuntak melalui Kabid Humas Kombes Hadi Wahyudi membenarkan pengungkapan narkoba tersebut.

“Iya benar, Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut dan Satres Narkoba Polrestabes Medan yang mengungkapkannya,” ucap Hadi, Rabu (8/3).

Hadi mengatakan, barang haram itu dikemas oleh pelaku dalam beberapa karung dan berhasil diamankan sabu seberat 46 kilogram, yang dikemas dalam dua goni warna putih serta tiga bungkus

berisikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 19.760 butir.

“Dari TKP penyidik juga mengamankan satu unit handphone dan mobil Mitsubishi X-Pander warna putih yang digunakan pelaku,” terang Hadi.

Dijelaskan Hadi, pengungkapan kasus narkoba itu berawal informasi masyarakat yang dikembangkan, penyidik bergerak langsung ke Jalan Mahoni Batu 5 Lingkungan X Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai.

Personel Unit 1 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut dan Satresnarkoba Polrestabes Medan dengan dibekali informasi yang diperoleh dari masyarakat langsung bergerak cepat agar dapat memberhentikan mobil Mitsubishi yang dikendarai pelaku.

“Kemudian dilakukan pengeledahan mobil tersebut dan ditemukan 6 karung goni berisikan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi,” ujarnya. ● lus

Usut Kasus Lukas Enembe, KPK Geledah Rumah di Depok

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan korupsi Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe (LE). Salah satunya dengan menggeledah sebuah rumah di Depok, Jawa Barat, pada Selasa 7 Maret 2023, kemarin.

Namun, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri tak menyebutkan lebih rinci identitas pemilik rumah yang digeledah.

“Kemarin Tim Penyidik melakukan pengeledahan di wilayah Kota Depok, Jabar. Lokasi yang dituju yaitu rumah kediaman dari pihak yang terkait dengan perkara ini,” tutur Ali dalam keterangannya, Rabu (8/3).

Dari hasil pengeledahan, Ali menyebut, penyidik berhasil mengamankan alat elektronik.

Ia menduga, alat elektronik itu dapat menerangkan dugaan penerimaan suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh LE.

“Analisis dan penyitaan masih akan dilakukan untuk melengkapi berkas perkara penyidikan,” tutur Ali.

Dalam menangani

perkara itu, KPK sebelumnya telah melakukan pengeledahan sejumlah lokasi di Provinsi Papua, pada Selasa, 7 Februari 2023. Sejumlah lokasi yang digeledah yakni Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta beberapa rumah pejabat Pemprov Papua.

KPK berhasil mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan korupsi Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe (LE). Barang-barang tersebut di antaranya, dokumen hingga perangkat kamera pengawas atau CCTV.

Sekadar informasi, KPK telah menetapkan Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe (LE) sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur.

Lukas ditetapkan sebagai tersangka suap bersama Bos PT Tabi Bangun Papua (PT TBP), Rijatono Lakka (RL).

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Sedangkan Rijatono ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Lukas diduga menerima suap sebesar Rp1 miliar dari Rijatono. Suap itu diberikan karena perusahaan Rijatono dimenangkan dalam sejumlah proyek pembangunan di Papua.

Sedikitnya, ada tiga proyek di Papua bernilai miliaran rupiah yang dimenangkan perusahaan Rijatono Lakka untuk digarap. Ketiga proyek tersebut yakni, proyek multi years peningkatan jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp14,8 miliar.

Kemudian, proyek multi years rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp13,3 miliar. Selanjutnya, proyek multi years penataan lingkungan venue menembak *outdoor* AURI dengan nilai proyek Rp12,9 miliar.

KPK menduga Lukas Enembe juga menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya hingga jumlahnya miliaran rupiah. Saat ini, KPK juga sedang mengusut dugaan penerimaan gratifikasi lainnya tersebut. ● han

FOTO: ANT



PENERAPAN KURIKULUM MERDEKA

Guru menyampaikan materi pada kegiatan belajar mengajar di TK Baitul Izzah di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Rabu (8/3). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyebutkan hingga akhir tahun 2022 sebanyak 151 ribu satuan pendidikan telah menerapkan Kurikulum Merdeka.

INFORMASI PENUTUPAN KANTOR CABANG KB BUKOPIN

Yth Nasabah KB Bukopin,

Dengan ini kami informasikan bahwa efektif pada tanggal 14 April 2023 akan dilakukan penutupan layanan Kantor Cabang Operasional sebagai berikut:

Kantor Cabang Pembantu Meruya

Jalan Meruya Ilir No. 12C
Jakarta Barat - 11620

Terkait dengan penutupan layanan tersebut, Nasabah KB Bukopin tetap dapat melakukan transaksi di seluruh jaringan cabang dan e-channel Bank KB Bukopin.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Halo KB Bukopin 14005 dan Bank KB Bukopin
Kantor Cabang Kebon Jeruk (021) 53673891

Hormat Kami,
PT Bank KB Bukopin, Tbk

KB Bukopin